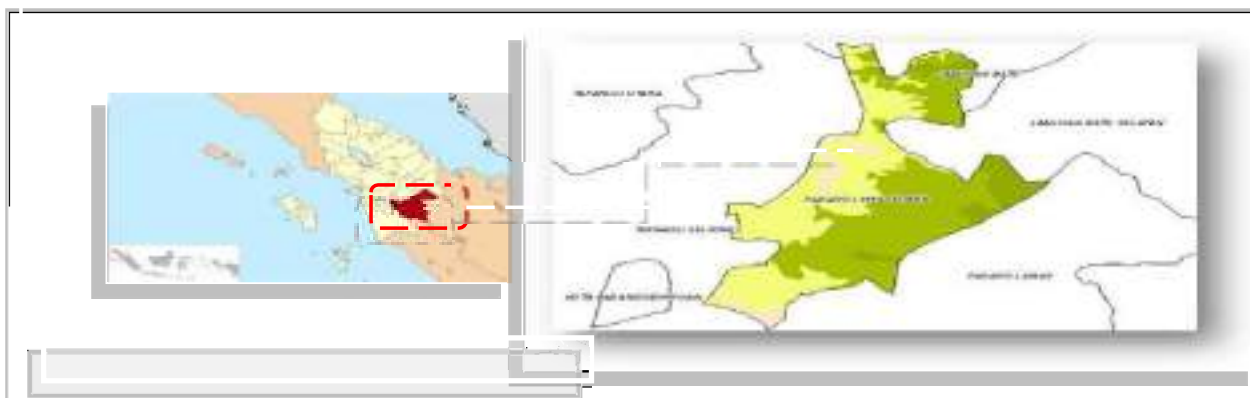




RENJA TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan Waktu dan kesempatan hingga terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

Rencana Kerja (Renja) disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan memperhatikan seluruh kepentingan OPD. Rencana kerja (Renja) bertujuan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, agar pelaksanaannya sesuai dengan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara. Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan Rencana kerja (Renja) Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, kebijakan, Program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Disadari bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan saran dan pendapat yang bersifat membangun untuk kesempurnaan pada tahun mendatang.

Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

Gunungtua, Juli 2022

**KEPALA DINAS KOPEASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



SITI AWAN, SH., M.Si
NIP. 19630109 198303 2 003

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I.	PENDAHULUAN.....	
	1.1 Latar Belakang.....	
	1.2 Landasan Hukum.....	
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	
	1.4 Sistematika Penulisan.....	
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
BAB III.	TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
	3.1 Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	
	3.3 Program dan Kegiatan.....	
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
BAB V.	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RKPD. Adapun yang menjadi acuannya adalah Renja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Menindaklanjuti Undang - undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Serta Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Perubahan Atas Peraturan Dearah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam peraturan daerah tersebut di uraikan bahwa OPD yang membidangi urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara. Kedudukan, organisasi, tata kerja dan uraian tugas pokok dan fungsi ditetapkan melalui peraturan Bupati Padang Lawas Utara No. 34 Tahun 2016 yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Padnglawas Utara Nomor 47 Tahun 2017.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan suatu Dinas yang membantu Bupati di Bidang Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pembangunan seperti penataan struktur Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan pengembangan sentra Koperasi,UKM dan Ketenagakerjaan yang potensial. Kembangan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan bertujuan meningkatkan ekonomi

masyarakat melalui pelatihan, jaminan sosial, pemberdayaan dan pengembangan.

Atas dasar dan tujuan diatas maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Padang Lawas Utara perlu menyusun “ Renja ” yang sinergik, strategi dan kronologis sebagai pedoman dalam tugas pokok dan fungsi selama satu tahun kedepan yang penyusunannya tetap mengacu pada RENSTRA OPD dan RKPD Padang Lawas Utara.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Nomor 4421);
2. Undang - undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuanagn Dearah

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Rencana Kerja (Rencana kerja) OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dengan maksud sebagai bahan acuan dalam melaksanakan Program Kegiatan yang menyangkut bidang Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan selama satu tahun berjalan dengan tujuan agar Program Kegiatan dapat terencana, terarah dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Maksud dari disusunnya suatu Rencana kerja adalah :

- Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Diskopukmnaker
- Menjadi Pedoman Penyusunan Sakip
- Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA PPAS, RAPBD dan APBD
- Menjadi Pedoman Penyusunan Sakip
- Mengetahui Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 Diskopukmnaker

- Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pilihan opd;
- Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat;
- Dasar Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Tujuan

Tujuan Penyusunan Ranwal Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

- Untuk menyeragamkan langkah Perencanaan Pembangunan yang akan dilakukan di Daerah yang didasarkan pada perencanaan pusat, provinsi dan daerah terkait dengan Tupoksi OPD yang di emban.
- Memberikan arah,tujuan,sasaran strategis kebijakan,Program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan kewenagakerjaan
- Tersedianya arah kebijakan teknis di Bidang Koperadsi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- Untuk menilai dan melihat Kesiambungan Program OPD terhadap Kesejahteraan Rakyat.
- Tersusunnya Program dan Kegiatan Di lingkungan Koperasi usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagkaerjaan satu tahu kedaepan untuk kemedian di uraikan kedalam RKA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- Sebagai Dokumen dasar bagi OPD terhadap tindakan Pengawasan dan sekaligus alat Monitor dan Evaluasi yang dilakukan oleh Badan

Pengawas Keuangan Negara dan Daerah terhadap Perencanaan Kegiatan dan Program serta Implementasinya di Masyarakat.

- Sebagai bahan dasar bagi OPD untuk menggambarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan di masyarakat dan sebagai bahan masukan untuk OPD dalam menyempurnakan pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.
- Tersedianya Rumusan Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dalam pengelolaan pemerintah yang meru[akan indikator Program yang tertuang dan sebagai tolak ukur pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Ranwal Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 5 (Lima) Bab dan memuat beberapa Sub Bab antara lain :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DiSKOPUKMNAKER Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Diskopukmnaker
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi diskopukmnaker
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELKSANAAN DINAS KOPERASI UKM DAN

KETENAGAKERJAAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 Untuk Mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi realisasi renja. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Tahun 2023 adalah :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	>91	Sangat Tinggi	
2	76 > 90	Tinggi	
3	66 > 75	Sedang	
4	51 > 65	Rendah	
5	< 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,00 %
2	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih	10,00 %
3	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Terpenuhinya Tenaga Kerja Yang Produktif	55,00 %
4	Terpenuhinya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	60,00 %
5	Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja	Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab)	100,00 %
6	Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi	1. Persentase Koperasi Aktif	50,00 %
		2. Persentase Pertumbuhan Koperasi	52,00 %
7	Pertumbuhan Jumlah Wirausaha	Meningkatnya Peran UMKM terhadap PDRB	17.769 UMKM

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Terdiri dari 2 Program antara lain

1. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenagakerja

- Indikator Pencari Kerja yang di tempatkan dengan target 62,5% dengan realisasi 45,27 % hal ini disebabkan belum

adanya kesadaran para pencari kerja untuk melapor di terima apa tidak Pencari kerja tersebut di tempat mereka melamar pekerjaan . Persentase Pencari Kerja yang di tempatkan dengan target

2. Program Pengembangan UMKM dengan Indikator Meningkatnya Peran UMKM Terhadap PDRB dengan Targer 18.344 UMKM denagn Realisasai 17.944 UMKM

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan target 66% dan Realisasi 70,33% ini merupakan indiatir makro yang yang di keluarkan oleh BPS

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program atau Kegiatan yang telah memenuhi target terdiri dari 2 program Pelatihan kerja dan Poduktivitas Tenagakerja dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan target 66% dan Realisasi 70,33% ini merupakan indiatir makro yang yang di keluarkan oleh BPS dan Indikator Persentase Pencari Kerja yang di latih dengan target 50% dengan reaalisasi 70% dan indikator Terpenuhinya Tenaga kerja yang produktif dengan target 55.455.270.252 dengan realisasi 676.922.536

- Program Program ini terdiri dari kegiatan dengan out put sebagai berikut :
 - a) Pelatihan Menyablun anggaran APBD Murni dengan 20 orang peserta

- b) Pelatihan Menyablon Anggaran DBHCT 16 Orang Peserta
- c) Pelatihan coffee Robusta Dana DAU EARN MARK dengan 20 Peserta

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tidak ada

TABEL T-C 2.9 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun		Realisasi Capaian Kinerja Rastera RPJMD s.d SAPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019 s.d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		RPJMD s.d SAPD		RPJMD Tahun 2023		I		II		III		IV		(RKPD Tahun 2019-2023)		Periode 2019-2023 (%)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENCAH DAN KETENAGAKERJAAN																							
1	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Terampil	07.03	PEMBUNGAH INDUSTRI	PENGALAMAN UMUM					84.523.000										84.523.000		100,00%	0,00%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENCAH DAN KETENAGAKERJAAN
1.1		07.03.1	Penyediaan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Gaji Minimum Kabupaten					84.523.000									84.523.000		100,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja																							
Predikat Kinerja																							
2	Meningkatkan Jumlah	1.07	Program Tenaga Kerja	INFO DOKUMEN PASAR KERJA																	0,00%	0,00%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
2.1		1.07.1	Pengelola Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi yang Dihasilkan Melalui Media Cetak																	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja																							
Predikat Kinerja																							
3	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Swasemb	1.07	Program Pembinaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen transmigrasi																	0,00%	0,00%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENCAH DAN KETENAGAKERJAAN
3.1		1.07.1	Penilaian Penyebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen transmigrasi																	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja																							
Predikat Kinerja																							
4	Meningkatkan Daya Tanggap Tenaga Kerja Dengan Melakukan Pembinaan dan Pelatihan	1.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kepersertaan pencari kerja yang produktif					304.999.300										304.999.300		100,00%	100,00%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENCAH DAN KETENAGAKERJAAN
4.1		1.07.03.1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan 1000 Kompetensi						304.999.300									304.999.300		100,00%	100,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja																							
Predikat Kinerja																							

13300000

No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Divisi/Unit) Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun		Realisasi Capaian Kinerja Rencana RPJMD s.d SKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Pengaruh Daerah Penerimaan		
					2019 s.d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		K	Rp	K	Rp									2023		Tahun 2023				
					K	Rp					K	Rp	I	II	III	IV	(RKPD Tahun 2019-2023)	Periode 2019-2023 (%)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
5	801 Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				894.908.700		81.145.889			0		338.165.357		411.509.349		894.908.700		95,33%	95,00%	DIRKAS KOPERASI, USAHA NEOL DAN BREVENGAN DAN BERTUMBUHANN		
5.1		2.17.01.3	Administrasi Keperawatan Peringkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keperawatan Peringkat Daerah			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
5.2		2.17.01.2	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah			150	145.700.000		0	0	0	0	3	35.000.000		9	100.100.000		155.700.000		100,00%	92,65%		
5.2.1		2.17.01.2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			11	145.750.000		0	0	0	11	35.000.000		9	100.100.000		11	155.700.000		100,00%	92,65%		
5.3		2.17.01.4	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Peringkat Daerah			8	371.875.000		4	7.360.000		0	0	0	117.679.390		37	174.193.900		348.483.300		100,00%	88,48%	
5.3.1		2.17.01.4.1	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Berstandar	Jumlah Paket Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Berstandar			0	6.529.000		0	0	0	0	0	2.801.000		9	714.400		3.375.400		100,00%	55,84%		
5.3.2		2.17.01.4.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Berstandar			1	88.260.900		1	0	0	0	0	35.672.600		1	52.936.300		1	88.609.100		100,00%	99,83%	
5.3.3		2.17.01.4.11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Berstandar			1	22.381.600		0	0	0	0	0	10.318.800		1	19.096.800		1	22.381.600		100,00%	100,00%	
5.3.4		2.17.01.4.12	Penyediaan barang takkan dan penggantian	Jumlah Paket Barang Takkan dan Penggantian yang Berstandar			10	25.815.500		1	6.000.000		0	0	0	6.690.500		10	6.100.500		21.005.000		100,00%	85,58%	
5.3.5		2.17.01.4.13	Penyediaan Bahan Baku dan Pemeliharaan Perantara Limbah yang Berstandar	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pemeliharaan Perantara Limbah yang Berstandar			1	24.000.000		0	0	0	0	0	6.000.000		1	6.000.000		1	24.000.000		100,00%	100,00%	
5.3.6		2.17.01.4.14	Pengelolaan Ruang Koordinat dan Komunitas MPO	Jumlah Laporan Pengelolaan Ruang Koordinat dan Komunitas MPO			11	198.386.800		1	4.350.000		0	0	0	45.588.400		11	198.386.800		198.386.800		100,00%	98,73%	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Penilaian terhadap kondisi organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dengan analisis SWOT, yaitu analisis dengan melibatkan seluruh Stake Holders melalui diskusi dua arah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam segi pelayanan, telah mengikuti dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal terhadap penanganan Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Analisis terhadap kondisi internal dan eksternal yang pada dalam Perkembangan Koperasi , UKM dan Ketenagakerjaan . Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal
 - 1.1. Kekuatan (strengths)
 - a. Tersedianya pranata hukum (Perda dan Surat Keputusan);
 - b. Tersedianya Anggaran;
 - c. Tersedianya Sumber Daya Manusia.
 - 1.2. Kelemahan (weaknesses)
 - a. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung
 - b. System Pengendalian dalam Pengawasan Badan Hukum ;

- c. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
 - d. Belum sepenuhnya Program / Kegiatan yang dilaksanakan mengacu Kepada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan
- 2. Analisis Lingkungan Eksternal
 - 2.1. Kesempatan (opportunities)
 - a. Adanya kebijakan pemerintah untuk pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
 - b. Keinginan pelaku Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Usahnya;
 - 2.2. Ancaman (threats)
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
 - b. Kurangnya Kemampuan Masyarakat dalam berdaya saing
 - c. Adanya kebijakan teknis dari lintas sektoral yang mempengaruhi Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan
- 3. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
 - a. Adanya motivasi yang tinggi dari SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk meningkatkan kualitas Koperasi,UKM dan Ketenagakerjaan dengan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
 - b. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait;
 - c. Adanya system yang mendukung dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi Usaha kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai fungsi yaitu:

- 1. Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.

2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Menengah
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
4. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
5. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan mempunyai Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan. Untuk Menyelenggarakan Fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas Melaksanakan Kewenangan di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD) adalah penjabaran dari RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara. Rancangan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang lawas Utara. Program dan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rancanag Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah.

Telaahan terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja dicapai oleh OPD dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan RKPD;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas OPD sudah termuat dalam rancangan RKPD.
5. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
6. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, telah dilakukan langkah berikut:
 - a. Mengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;
 - b. Meneliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra OPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan
 - c. Memberikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja OPD.
8. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), telah dilakukan langkah berikut:

- a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam renja RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, melakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra OPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
 - b. Meneliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
 - c. Meneliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan akhir RKPD, target capaian Renstra OPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
 - d. Memberikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja OPD.
9. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap renja RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

TABEL T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	KAB. PALUTA	Persentase Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	212.902.464	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	KAB. PALUTA	Persentase Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	136.176.200	
i	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			20 Peserta	212.902.464	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			20 Peserta	136.176.200	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	KAB. PALUTA	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	KAB. PALUTA				
2	Program Hubungan Industrial	KAB. PALUTA	Persentase Pemenuhan Hubungan Industrial	1 dokumen	195.000.000	Program Hubungan Industrial	KAB. PALUTA	Persentase Pemenuhan Hubungan Industrial	1 dokumen	55.109.400	
i	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi (satu) Daerah Kabupaten/Kota				195.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi (satu) Daerah Kabupaten/Kota				55.109.400	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	KAB. PALUTA	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (pp/pkb.Struktur skala Upah dan LKS Biparti dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan		Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	KAB. PALUTA	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (pp/pkb.Struktur skala Upah dan LKS Biparti dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	2.944.368.646	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	2.908.646.846	
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	2 Kegiatan	20.240.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	2 Kegiatan	28.255.300	
i	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. PALUTA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.640.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. PALUTA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.502.200	
ii	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.753.100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	Dokumen	2.204.040.546	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	Dokumen	2.205.600.546	
i	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. PALUTA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	2.057.025.446	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. PALUTA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	2.057.025.446	

ii	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dokumen	144.000.000	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dokumen	145.560.000	
iii	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	3.015.100	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	KAB. PALUTA	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	3.015.100	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB. PALUTA	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	348.191.636	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB. PALUTA	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	299.094.200	
i	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAB. PALUTA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.776.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAB. PALUTA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.652.400	
ii	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. PALUTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.085.060	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. PALUTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	77.319.000	
iii	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.280.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.993.600	
iv	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB. PALUTA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.141.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB. PALUTA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.856.200	
v	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB. PALUTA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	24.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB. PALUTA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	20.597.000	
vi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	183.908.976	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	140.676.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB. PALUTA	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Kegiatan	16.912.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB. PALUTA	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Kegiatan	16.912.500	
i	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PALUTA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.912.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PALUTA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.912.500	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. PALUTA	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Kegiatan	255.083.964	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. PALUTA	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Kegiatan	288.654.300	
i	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000	
ii	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.036.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.440.000	
iii	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	232.547.964	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. PALUTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	238.014.300	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Kegiatan	99.900.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Kegiatan	70.130.000	

i	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB. PALUTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	78.820.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB. PALUTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	45.820.000	
ii	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PALUTA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	21.080.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PALUTA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	24.310.000	
4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Unit Usaha	38.729.942	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Unit Usaha	50.132.000	
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi ,koperasi simpan pinjam ,unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabuoaten/ kota	KAB. PALUTA				Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi	KAB. PALUTA				
	Peningkatan Kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat,sehat,Mandiri Tangguh serta Akuntabel	KAB. PALUTA	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan tersedianya koperasi yang kuat,sehat,mandiri,Tangguh sertaAkuntabel	15 Unit Usaha	38.729.942	Peningkatan Kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat,sehat,mandiri,Tangguh serta Akuntabel	KAB. PALUTA	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan tersedianya koperasi yang kuat,sehat,mandiri,Tangguh sertaAkuntabel	15 Unit Usaha	50.132.000	
5	PROGRAM PENDidikan dan latihan perkoperasian		Persentase Pemenuhan Pendidikan dan latihan perkoperasian	orang	217.161.894	PROGRAM PENDidikan dan latihan perkoperasian		Persentase PENDidikan dan latihan perkoperasian	orang	45.261.000	
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah Kenggotaannya daerah Kab/ Kota	KAB. PALUTA				Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah Lintas daerah Kab/ Kota dalam (satu)Daerah Provinsi	KAB. PALUTA				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM Yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	55 orang	217.161.894	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM Yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	55 orang	45.261.000	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	KAB. PALUTA	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	3 Keluarga	25.725.714	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	KAB. PALUTA	Persentase PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3 Keluarga	34.507.000	
2	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kabupaten Kota	KAB. PALUTA				Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1(satu)daerah provinsi	KAB. PALUTA				
	Pemenuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembanagan Ekonomi Lainnya		Jumlah Kelurga yang mengikuti pemenuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf Hidup keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan ekonomi Lainnya	3 Keluarga	25.725.714	Pemenuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembanagan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarh=ga yang mengikuti pemenuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf Hidup keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan ekonomi Lainnya	3 Keluarga	44.000.000	
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro	orang	239.515.272	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro	orang	34.406.800	

	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan, Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para pemangku kepentingan	KAB. PALUTA				Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan, Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para pemangku kepentingan	KAB. PALUTA				
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Perizinan	Orang	100.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Perizinan	Orang		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan Kompetensi SDM/Usaha Mikro dan Kewirausahaan	KAB. PALUTA	Jumlah SDM yang Memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	5 Orang	139.515.272	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan Kompetensi SDM/Usaha Mikro dan Kewirausahaan	KAB. PALUTA	Jumlah SDM yang Memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	5 Orang	34.406.800	
8	Program Pengembangan UKM	KAB. PALUTA	Persentase Pengembangan UKM	unit usaha	48.790.148	Program Pengembangan UKM	KAB. PALUTA	Persentase Pengembangan UKM	unit usaha	47.156.600	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	KAB. PALUTA	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil			Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	KAB. PALUTA	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil			
	fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, Sumber daya manusia, serta desain dan Teknologi	KAB. PALUTA	Jumlah Unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan Teknologi	21 Unit Usaha	48.790.148	fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, Sumber daya manusia, serta desain dan Teknologi	KAB. PALUTA	Jumlah Unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan Teknologi	21 Unit Usaha	47.156.600	
JUMLAH					3.922.194.080	JUMLAH					3.311.395.846

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun yang langsung ditujukan kepada Dinas Pertanian dalam bentuk proposal maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD kabupaten dari pelaksanaan hasil musrenbang kecamatan.

Usulan rencana pembangunan tanaman pangan dan perkebunan mengacu pada system bottom up, proses untuk memperoleh usulan dari pemangku kepentingan melalui identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diajukan ke desa untuk diverifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi usulan prioritas desa.

Selanjutnya usulan diajukan ke tingkat kecamatan untuk dikaji melalui musrenbang kecamatan, hasil musrenbang kecamatan menjadi usulan program/kegiatan dan diajukan ke Bappeda untuk dikaji melalui musrenbang kabupaten.

Hasil musrenbang kabupaten tidak seluruhnya bias disetujui karena banyaknya usulan kegiatan dan keterbatasan anggaran daerah untuk mendanai program/kegiatan. Oleh karena itu usulan prioritas kecamatan dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk disinkronkan dengan renstra OPD, RPJMD dan program/kegiatan baik dari propinsi dan pusat menjadi rencana kerja tahunan OPD.

Tabel : Usulan Program dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten

Padang Lawas Utara terlampir :

**Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 	Kecamatan Simangambat	Persentasi Tenaga Kerja yang Produktif	100 KK	
2	Program Pengembangan UMKM				
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 	Kecamatan Padang Bolak Desa Huta Baringin	Jumlah UMKM yang Aktif	20 KK	

USULAN RESES (POKIR)

NO	USULAN	LOKASI	JUMLAH	DPR PENGUSUL
1	Kursus Pelatihan Lapangan Kerja	Kecamatan Simangambat Kab. Padang Lawas Utara	100 Meter	Samsul BAHRI Daulay, s, pd
2	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Desa Huta Baringin Kabupaten Padang Lawas Utara	20 Orang	Muhammad Yusuf Pasaribu, S.Pd, MM

USULAN MASYARAKAT

NO	USULAN	LOKASI	JUMLAH
1	Pelatihan Digitalisasi Promosi Pemasaran UMKM (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah)	Gunung tua, Kab. Padang Lawas Utara	20 KK
2	Pelatihan Digitalisasi Promosi Pemasaran UMKM (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah)	Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara	20 KK
3	Kursus Pelatihan Lapangan Kerja	Aek Siholip, Kab. Padang Lawas Utara	20 KK

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Kebijakan Nasional tertuang di dalam RPJMN, dan juga dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019-2023 Kabupaten Padang Lawas Utara Dimana Tema RKP Pemerintah Tahun 2019- 2023 Dengan prioritas yaitu:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Penanggulangan Pengangguran
4. Pemulihan Dunia Usaha
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar (Air bersih dan sanitasi)
6. Pembangunan Ekonomi Hijau yang menjadi respons terhadap Perubahan Publik
7. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN

Kemudian disinkronkan dengan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara **“Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Kehidupan Masyarakat Pasca Pandemi Covid 19, Menuju Sumatera Utara Bermartabat”** dimana Prioritas Pembangunan daerah provinsi Tahun 2023 difokuskan kepada :

1. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan;
3. Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;

4. Penyediaan Layanan Kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata;

Dalam prioritas pembangunan daerah provinsi Diskopukmnaker difokuskan pada nomor 1 yaitu Peningkatan Kesempatan Kerja dan berusaha melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Untuk arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara dan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023, dengan Tema **“Peningkatan Perekonomian dan Kesehatan Masyarakat Menuju Padang Lawas Utara Sejahtera”** dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Padang Lawas Utara difokuskan pada :

1. Peningkatan Perekonomian Masyarakat
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
3. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah
5. Peningkatn Nilai Tambah Hasil Pertanian
6. Peningkatan Daya Dukung daerah dalam Menciptakan Peluang Investasi
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara prioritas pembangunan tahun 2023 DiskopukmNaker difokuskan pada nomor 1 yaitu Peningkatan Perekonomian Masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam dokumen Rancangan Renja , Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan menetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Uaha Kecil dan Menengah.

3.2.1 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi tersebut di atas, tujuan pembangunan sektor Koperasi ,UKM dan Ketenagakerjaan adalah:

- ❖ Sektor Koperasi

- a. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang Badan Usaha Koperasi
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang koperasi sejak usia dini
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktek perkoperasian yang benar sesuai dengan prinsip dan jatidiri koperasi.
- d. Mengajak masyarakat mendirikan koperasi termasuk kepada kelompok ekonomi produktif
- e. Meyakinkan kepada masyarakat bahwa koperasi dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat

❖ Sektor UKM :

- a. Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di lingkungan Masyarakat
- b. Memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah
- c. Meningkatkan kerjasama terhadap pemerintah / swasta.
- d. Meyakinkan kepada masyarakat bahwa Usaha Kecil dan Menengah dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat
- e. Pembinaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah.

❖ Sektor Ketenagakerjaan

- a. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
- b. Memberikan Pengetahuan Kepada Pencari Kerja dengan Mengadakan Kegiatan Pelatihan dan Keterampilan.
- c. Mengurangi Pengangguran dan Perluasan Lapangan Kerja
- d. Meningkatkan Pengawasan terhadap perusahaan yang ada

- e. Menyebarluaskan Informasi pasar kerja

3.2.2. Sasaran

- a. Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (*Cooperative – Minded*)
- b. Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (*Capacity Building*)
- c. Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi
- d. Meningkatkan kualitas dan Produktivitas Ketenagakerjaan
- e. Memberikan Pengetahuan kepada pencari kerja dengan mengadakan kegiatan pelatihan Keterampilan
- f. Mengurangi pengangguran dan memperluas lapangan kerja
- g. Meningkatkan Pengawasan terhadap perusahaan yang ada
- h. Mengidentifikasi calon lokasi pemukiman transmigrasi
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat eks Transmigrasi dan sekitarnya
- j. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat eks Transmigrasi dengan Masyarakat Sekitar.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan maka program yang akan dilakukan adalah :

❖ Program

1. Program Penunjang Urusan Pemeritah Dearah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

6. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
7. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
8. Program Perkembangan UMKM
9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro UMKM
10. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

❖ Kegiatan

1. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasai Kinerja Perangkat Dearah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Peangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Dearah
5. Peyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah
6. Pemeliharaan barang Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah
7. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
8. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
9. Penesahan Peraturan Perusahaan pendaftaran Perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya (satu) Dearah Kabupaten Kota
10. Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
11. Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Dearah kabupaten/Kota
12. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
13. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam kabupaten/Kota
14. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dukungan Melalui Pendataan,Kemitaan,Kemudahan Perjanjian,Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan
15. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
16. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Dearah Kabupaten/Kota.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.06.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.06.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2				U	US	N PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07			U	US	N PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										191,285,600		365,000,000
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										136,176,200		235,000,000
2	07	03	2.01	F	elak	anaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										136,176,200		235,000,000
2	07	03	2.01	01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Pemenuhan Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun N	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 oarang	16 Orang	20 orang	136,176,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase Pemenuhan Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	20 oarang	235,000,000
2	07	05		F	OG	AM HUBUNGAN INDUSTRIAL										55,109,400		130,000,000
2	07	05	2.01	F	eng	sahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										55,109,400		90,000,000
2	07	05	2.01	03		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Pemenuhan Hubungan Industrial Persentase Pemenuhan Hubungan Industrial	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Terlaksananya UMKAB	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 laporan	1 Laporan	1 Dokumen	55,109,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Hubungan Industrial Persentase Pemenuhan Hubungan Industrial	1 Dokumen 1 laporan	90,000,000
2	17			U	US	N PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										3,120,110,246		3,592,156,206
2	17	01		F	OG	AM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,908,646,846		3,293,156,206
2	17	01	2.01	F	erer	anaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										28,255,300		21,804,000
2	17	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan 0 Dokumen 2 Dokumen	2 Kegiatan	17,502,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	g2arKaengiatan	9,000,000
2	17	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	1 Laporan	2 Kegiatan	10,753,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	g2arKaengiatan	12,804,000
2	17	01	2.02	m		istrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,205,600,546		2,522,025,266
2	17	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pwrsentase Peenuhan Urusan Pemerintah Derah kabupaten/Kota Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen 12 Dokumen	300 Orang/bulan	af2 Dokumen	2,057,025,446	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pwrsentase Peenuhan Urusan Pemerintah Derah kabupaten/Kota Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	12 Dokumen 12 Dokumen	2,357,025,266

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.06.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.06.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pwrsentase Peenuhan Urusan Pemerintah Derah kabupaten/Kota Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	145,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pwrsentase Peenuhan Urusan Pemerintah Derah kabupaten/Kota Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	12 Dokumen 12 Dokumen	160,000,000
2 17 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pwrsentase Peenuhan Urusan Pemerintah Derah kabupaten/Kota Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen 12 Dokumen	1 Laporan	12 Dokumen	3,015,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pwrsentase Peenuhan Urusan Pemerintah Derah kabupaten/Kota Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	12 Dokumen 12 Dokumen	5,000,000
2 17 01 2.06 Adm	istrasi Umum Perangkat Daerah								299,094,200				268,128,640	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 kegiatan	1 Paket	7 Kegiatan	6,652,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	7 kegiatan	11,854,040
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 kegiatan	1 Paket	7 Kegiatan	77,319,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	7 kegiatan	46,811,300
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 kegiatan	1 Paket	7 Kegiatan	27,993,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	7 kegiatan	49,808,000
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 kegiatan	1 Paket	7 Kegiatan	25,856,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	7 kegiatan	25,455,300
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Surat dan Buku peraturan yang di bayar / diadakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 kegiatan	0 Dokumen 45 Dokumen	7 Kegiatan	20,597,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	7 kegiatan	26,400,000
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah		7 kegiatan	100 Laporan	7 Kegiatan	140,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	7 kegiatan	107,800,000
2 17 01 2.07 Peng	daan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								16,912,500				40,000,000	
2 17 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		16,912,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.06.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.06.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 01 2.08 Peny	iaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								288,654,300				309,698,300	
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyedia Urusan Pe,erintah daerah Persentase Pemenuhan Urusan Pemeribtah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Penyedia Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kegiatan 100 %	12 Laporan	5 Kegiatan	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Penyedia Urusan Pe,erintah daerah Persentase Pemenuhan Urusan Pemeribtah Daerah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan 100 %	4,950,000
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyedia Urusan Pe,erintah daerah Persentase Pemenuhan Urusan Pemeribtah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyedia Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kegiatan 100 %	12 Laporan	5 Kegiatan	49,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Penyedia Urusan Pe,erintah daerah Persentase Pemenuhan Urusan Pemeribtah Daerah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan 100 %	48,945,600
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyedia Urusan Pe,erintah daerah Persentase Pemenuhan Urusan Pemeribtah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyedia Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kegiatan 100 %	12 Laporan	5 Kegiatan	238,014,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Penyedia Urusan Pe,erintah daerah Persentase Pemenuhan Urusan Pemeribtah Daerah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan 100 %	255,802,700
2 17 01 2.09 Peme	iharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								70,130,000				115,000,000	
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	4 Unit	2 Kegiatan	45,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	2 Kegiatan	90,000,000
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	0 Unit 34 Unit	2 Kegiatan	24,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	2 Kegiatan	25,000,000
2 17 03	PROG	AM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							50,132,000				55,000,000	
2 17 03 2.01 Peme	iksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								50,132,000				55,000,000	
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Tumbuhnya KUKM	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50,132,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	10 Unit Usaha	55,000,000
2 17 05	PROG	AM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							45,261,000				50,000,000	
2 17 05 2.01 Pend	ikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								45,261,000				50,000,000	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Pemenuhan Pendidian dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 orang	20 Orang	55 orang	45,261,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UMK		Persentase Pemenuhan Pendidian dan Pelatihan Perkoperasian	55 orang	50,000,000
2 17 06	PROG	AM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							34,507,000				44,000,000	
2 17 06 2.01 Pemi	rdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								34,507,000				44,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.06.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.06.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 06 2.01 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Jumlah keluarga yang mengikuti Pemenuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	tumbuhnya Koperasi Baru	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Keluarga	3 Keluarga 0 Keluarga	3 Keluarga	34,507,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	3 Keluarga	44,000,000
2 17 07	PROG	AM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							34,406,800				50,000,000	
2 17 07 2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							34,406,800				50,000,000	
2 17 07 2.01 06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Persentase Pemenuhan Pemverdayaan usaha menengah,Usaha Kecil,dan Usaha Mikro(UMKM)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Tumbuhnya UMKM baru	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	5 Orang	5 Unit	34,406,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pemverdayaan usaha menengah,Usaha Kecil,dan Usaha Mikro(UMKM)	5 Orang	50,000,000
2 17 08	PROG	AM PENGEMBANGAN UMKM							47,156,600				100,000,000	
2 17 08 2.01 Peng		mbangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							47,156,600				100,000,000	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase pemenuhan Pengembanagm UMKM	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	UMKM Go Digital	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Unit Usaha	21 Unit Usaha	21 Unit Usaha	47,156,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Pengembanagm UMKM	21 Unit Usaha	100,000,000
TOTAL									3,311,395,846				3,957,156,206	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program kerja Operasional merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Rp. 3.120.110.246,-
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Rp. 136.176.200,-
3. Program Hubungan IndustrialRp. 55.109.400,-
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp.45.261.000
5. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Rp. 50.132.000,-
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Rp.34.507.000,-
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
Rp.34.406.800,-
8. Program Pengembangan UMKM
Rp. 47.156.600,-

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perumusan Kebijakan Tekhnis sesuai Kewenangan Bidang Koperasi,UMKM, dan Ketenagakerjaan
2. Melaksanakan Tugas dan melakukan Pembinaan di Bidang Koperasi,UMKM, dan Ketenagakerjaan
3. Memberikan Rekomendasi perizinan sesuai Kewenangan Bidang Koperasi,UMKM, dan Ketenagakerjaan
4. Melaksanakan Tugas- tugas lain yang di berikan oleh Bupati Sesuai Tugas dan Fungsinya

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagai umpan balik bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan terlaksananya Rencana Kerja.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja diharapkan dapat tercapai sepenuhnya, dan diharapkan juga merupakan acuan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Gunungtua, Juli 2022

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



SITI AWAN,SH.,M.Si
NIP. 19630109 198303 2 003